

Penerapan Kurikulum Merdeka di SMKN 3 Banjarmasin

Muhammad Nunu Sanusi

SMK Negeri 3 Banjarmasin

muhammad.nunu.sanusi@gmail.com

Abstrak. Pemerintah menerapkan Kurikulum Merdeka pada 2024 untuk semua jenjang pendidikan. Ada banyak konsep dan program Kurikulum Merdeka, mulai dari Asesmen Nasional hingga P5 (Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila) yang perlu terus dikaji dalam implementasinya. Karena itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan Kurikulum Merdeka di SMKN 3 Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, pendidik dan peserta didik. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memberikan ruang yang cukup bagi guru dan peserta didik untuk belajar. Hal ini tampak pada penerapan Asesmen Nasional hingga P5 dimana ujian tidak lagi menjadi masalah dan kreativitas terbangun bagi pendidik dan peserta didik melalui P5. Penerapan Kurikulum Merdeka di SMKN 3 Banjarmasin sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, sekolah memerlukan beberapa penyesuaian. Atas dukungan dari semua elemen sekolah, maka hambatan-hambatan penerapan kurikulum ini dapat diatasi dengan baik.

Kata Kunci: Penerapan Kurikulum Merdeka; Krisis Pembelajaran; Struktur Kurikulum.

***Abstract.** The government is implementing the Merdeka Curriculum in 2024 for all levels of education. The Merdeka Curriculum includes many concepts and programs, from the National Assessment to P5 (Strengthening the Pancasila Student Profile Project), which require ongoing evaluation during its implementation. Therefore, this study aims to describe the implementation of the Merdeka Curriculum at SMKN 3 Banjarmasin. This research uses a qualitative approach, with principals, educators, and students as the subjects. Data was collected through interviews, observations, and document analysis. The results showed that the Merdeka Curriculum provides sufficient space for teachers and students to learn. This is evident in implementing the National Assessment and P5, where exams are no longer a significant issue, and creativity is fostered among educators and students. Implementing the Merdeka Curriculum at SMKN 3 Banjarmasin aligns with the stipulated provisions. Although the school requires some adjustments, the obstacles to implementing this curriculum can be effectively overcome with the support of all school elements.*

***Keywords:** Implementation of Merdeka Curriculum; Learning Crisis; Curriculum Structure.*

Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka sedikitnya telah sebelas kali pergantian kurikulum. Kurikulum yang terakhir adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dinilai oleh pemerintah mampu mengembangkan potensi pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka dianggap dapat membuat peserta didik belajar lebih ‘merdeka’ jauh dari tekanan, sehingga dapat mengembangkan potensinya dengan lebih baik. Kurikulum Merdeka mengacu pada pendekatan bakat dan minat (Madhakomala et al., 2022). Kurikulum Merdeka dalam

pembelajarannya berpusat pada peserta didik dan berdasarkan karakteristik peserta didik (Arrohman & Lestari, 2023; Mayekti, 2023).

Penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap, kepada sekolah-sekolah tertentu yang ditentukan yang kemudian disebut Sekolah Penggerak (SP). SP bukanlah sekolah unggulan tapi sekolah yang bersedia melakukan transformasi budaya (Sumarsih et al., 2022) dan melaksanakan Kurikulum Merdeka. Pada jenjang SMA Kurikulum Merdeka diterapkan oleh SP. Sedangkan pada jenjang SMK, ada program pemerintah yang lain, yaitu SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK). Sekolah yang ditunjuk menjadi SMK-PK diarahkan untuk menggunakan Kurikulum Merdeka dan diharapkan dapat mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain yang ada di sekitarnya. Penerapan Kurikulum Merdeka merupakan tantangan bagi sekolah-sekolah tersebut.

Menurut (Ainia, 2020) merdeka belajar sangat tepat diterapkan kepada peserta didik sesuai dengan tuntutan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0, karena merdeka belajar dapat mendorong peserta didik dalam pembelajaran, membantu membentuk diri, membantu memiliki sikap peduli, percaya diri dan membantu beradaptasi. Hal ini juga dikemukakan oleh (Palestina et al., 2020), bahwa penerapan kurikulum harus memberikan manfaat bagi peserta didik. Kurikulum Merdeka diharapkan mampu menjawab tantangan global, dimana era Revolusi Industri 4.0 semakin berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapat (Faiz & Purwati, 2021), bahwa merdeka belajar adalah kebijakan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan yang nantinya akan menciptakan peserta didik dan mahasiswa yang unggul dan siap menyongsong tantangan masa depan yang sangat kompleks. Ada banyak faktor kunci keberhasilan penerapan kurikulum di sekolah. Diantaranya adalah pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru-gurunya yang dalam konteks Kurikulum Merdeka dinamakan komite pembelajaran (Budiono et al., 2023; Munawar, 2022). Mereka harus memiliki kemauan untuk melakukan perubahan. Perubahan itu dimulai dari perubahan *mindset*. Kepala sekolah selaku pemimpin harus dapat mengubah pemahaman sumberdaya yang ada di sekolah tersebut untuk mau melakukan perubahan sehingga Kurikulum Merdeka dapat diterapkan (Rahayu et al., 2022).

SMKN 3 Banjarmasin sebagai sekolah PK telah mulai menetapkan Kurikulum Merdeka. Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah PK maka menjadi contoh dari sekolah-sekolah lain untuk penerapan Kurikulum Merdeka. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Kurikulum Merdeka di SMKN 3 Banjarmasin.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan guru di SMKN 3 Banjarmasin. Observasi dilakukan dengan mengamati sosialisasi kurikulum yang dilakukan oleh sekolah. Sosialisasi tersebut dalam rangka penyusunan perencanaan perangkat untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Observasi dilakukan pada pembelajaran dan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Sumber sekunder penelitian ini diperoleh dari Kemdikbudristek sebagai data pendukung maupun acuan observasi dan wawancara yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Lokasi SMKN 3 Banjarmasin terletak di kecamatan Banjarmasin Timur, tepatnya di kelurahan Sungai Lulut. Sekolah ini yang didirikan tahun 1964 dengan nama SMEA 2 ini sekarang memiliki 9 jurusan, yaitu: Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Manajemen Perkantoran, Bisnis Digital, Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata, Desain Komunikasi Visual, Teknik Komputer Jaringan, Film, dan Kuliner. Sekolah ini sering berperan sebagai *piloting* dari kebijakan pemerintah, mulai dari yang dikenal RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), SMK COE (*Center of Excellence*), hingga sekarang menjadi SMK PK (Pusat Keunggulan). Dari sisi kurikulum, SMKN 3 Banjarmasin selalu menjadi *piloting* bagi penerapan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk kurikulum merdeka.

Hasil observasi dan wawancara di SMKN 3 Banjarmasin menyatakan bahwa kepala sekolah mempunyai komitmen untuk mengembangkan potensi guru dan peserta didik secara optimal. Oleh karena itu, penerapan Kurikulum Merdeka sangat sesuai dengan komitmen tersebut. Selain itu, kepala sekolah peka terhadap perubahan, sehingga dapat menyesuaikan terhadap perkembangan. Perubahan kurikulum merupakan hal yang cepat atau lambat akan dialami oleh setiap sekolah. Sebagai satuan pendidikan milik pemerintah, sudah sepantasnya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal perubahan kurikulum. Kurikulum Merdeka dinilai dapat mengembangkan potensi guru dan peserta didik serta dapat menjawab tantangan global dimasa mendatang.

Sejak tahun 2021, SMKN 3 Banjarmasin tidak menggunakan Ujian Nasional (UN) untuk penetapan kelulusan peserta didik (Marsela Yulianti et al., 2022). Sekolah elah menerapkan AN, namun bukan untuk pengganti UN, melainkan sebagai masukan bagi pengembangan sekolah. Hal ini merupakan bagian pertama dari implementasi Kurikulum Merdeka. Asesmen

dilaksanakan oleh beberapa perwakilan kelas XI yang ditunjuk secara acak. Asesmen ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Asesmen dilaksanakan oleh pemerintah, pada tahun pertama, tidak diikuti seluruh sekolah secara nasional, namun hanya sekolah yang bersedia dan mempunyai sarana prasarana yang memadai. Ini salah satu wujud nyata SMKN 3 Banjarmasin selalu berupaya untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Selain peserta didik, asesmen juga dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Hal ini juga dapat menjadi salah satu masukan bagi pemangku kebijakan untuk menentukan rencana pendidikan ke depan. Hasil asesmen menjadi masukan bagi berbagai pihak, secara nasional, daerah, hingga ke tingkat sekolah.

Sekolah mengadakan penguatan Kurikulum Merdeka setiap semester. Penguatan dilakukan dengan *sharing* antar guru beserta kepala sekolah dan mengundang fasilitator dari luar sekolah untuk memberikan penyegaran materi Kurikulum Merdeka, baik secara daring maupun luring. Fasilitator yang mendampingi kegiatan ada beragam, dapat berasal dari daerah atau luar daerah. Fasilitator daerah dapat berasal dari Dinas Pendidikan atau pengawas sekolah. Pada kegiatan tersebut dibahas kembali penyusunan perangkat Kurikulum Merdeka, berupa analisis Capaian Pembelajaran (CP), pembuatan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan dilanjutkan dengan pembuatan modul ajar Kurikulum Merdeka. Sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan jenis mandiri berbagi, yang artinya SMKN 3 Banjarmasin melakukan pengembangan perangkat ajar secara mandiri. Kepala sekolah juga sering diundang di sekolah lain dalam rangka penerapan Kurikulum Merdeka.

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) telah berjalan di SMKN 3 Banjarmasin. Sekolah menerapkan jadwal pelajaran blok guna mengoptimalkan pembelajaran praktik dan juga pelaksanaan P5. Pelaksanaan peserta didik diarahkan untuk mendiskusikan tentang isu-isu terkini, seperti isu lingkungan, penyalahgunaan obat, pergaulan bebas. Peserta didik juga dipandu oleh modul, yang pada akhir modul ada penugasan kelompok ataupun individu. Pelaksanaan diarahkan oleh guru mata pelajaran yang terkait dengan P5. Selain itu, sekolah juga dapat mendatangkan para ahli untuk memberikan materi tentang isu-isu tersebut. Di sela-sela kegiatan, peserta didik dapat menampilkan minat dan bakat, agar dapat menjadi motivasi bagi peserta didik yang lain.

Pada kelas X SMKN 3 Banjarmasin, kelompok mata pelajaran yang diterapkan terbagi menjadi dua, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Pembagian mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran (JP) per pekan pada kelompok mata pelajaran umum ada pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Struktur Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran Umum Di SMK

| No. | Mata Pelajaran | JP per pekan |
|---------------|---|--------------|
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 |
| 4 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 3 |
| 5 | Sejarah | 2 |
| 6 | Seni Tari | 2 |
| 7 | Muatan Lokal (Pendidikan Alquran) | 2 |
| 8 | Bimbingan Konseling | 1 |
| Jumlah | | 19 |

Sumber: Data Penelitian (2023)

Pembagian mata pelajaran kelompok mata pelajaran kejuruan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Struktur Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran Kejuruan

| No. | Mata Pelajaran | JP per pekan |
|---------------|---|--------------|
| 1 | Matematika | 4 |
| 2 | Bahasa Inggris | 4 |
| 3 | Informatika | 4 |
| 4 | Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 6 |
| 5 | Dasar Kejuruan | 12 |
| Jumlah | | 30 |

Sumber: Data Penelitian (2023)

Berdasarkan struktur di atas yang diterapkan di SMKN 3 Banjarmasin, terdapat perbedaan dengan struktur Kurikulum Merdeka, yaitu adanya Bimbingan Konseling (BK) yang masuk sebagai mata pelajaran di kelas dengan alokasi waktu sebanyak 1 JP per pekan. Berbeda dengan struktur Kurikulum Merdeka dimana Bimbingan Konseling tidak masuk di kelas, namun waktu tersendiri sesuai kesepakatan sekolah. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya bertentangan, karena pada acuan struktur Kurikulum Merdeka disebutkan bahwa waktu untuk BK sesuai kesepakatan sekolah. Jika sekolah menginginkan ada waktu per pekan untuk guru BK masuk dalam kelas, maka hal ini tidak bertentangan dengan kebijakan struktur kurikulum merdeka. Hal ini didukung oleh konsep Kurikulum Merdeka yang memberi kebebasan kepada guru dalam membentuk potensi peserta didik. Peran guru BK sangat penting dalam menelusuri minat dan bakat peserta didik. Guru BK dapat lebih dekat mengenal peserta didik bimbingannya, jika dijadwalkan tatap muka per pekan.

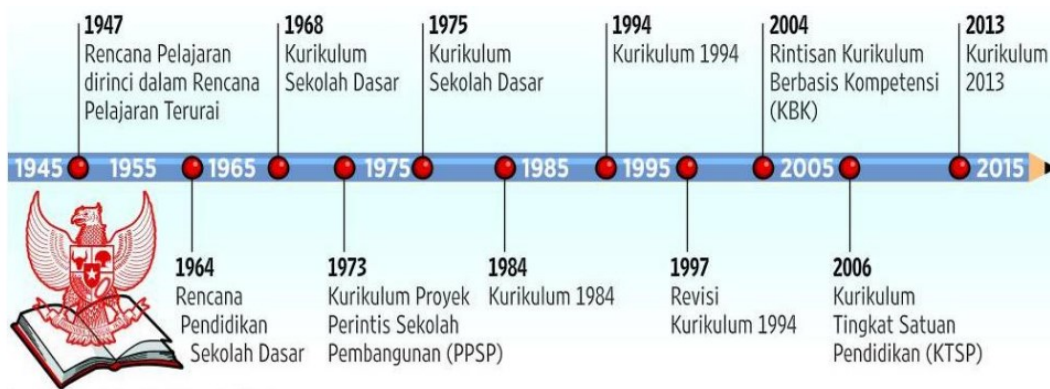
Pada mata pelajaran Muatan Lokal, sekolah memberikan muatan Pendidikan Alquran bagi yang beragama Islam, untuk peserta didik yang beragama lain, Muatan Lokal menyesuaikan

kitab suci masing-masing. Guru Muatan Lokal diampu oleh guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi Pendidikan Alquran. Muatan lokal diberikan waktu dua jam pelajaran tatap muka. Hal ini sudah sesuai dengan struktur Kurikulum Merdeka yang mengalokasikan waktu untuk muatan lokal sebanyak dua jam pelajaran per pekannya pada kelas X.

Pembahasan

UU Sisdiknas menyebutkan bahwa kurikulum adalah suatu rangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, dan metode pembelajaran yang menjadi panduan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pembelajaran, kurikulum adalah suatu perangkat rencana yang berisikan tujuan, bahan, cara dan isi pelajaran yang dijadikan sebuah pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (Suryaman, 2020). Kurikulum diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah proses pendidikan, perbaikan sumber daya manusia, dan menjawab tantangan global. Sejak tahun 1947 hingga tahun 2013, perubahan kurikulum di Indonesia dianggap sering terjadi (Vhalery et al., 2022).

Gambar 1. Garis Waktu Perkembangan Kurikulum di Indonesia



Sumber: Kemdikbud

Ketika membahas perubahan kurikulum, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara kurikulum nasional dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum nasional adalah kurikulum acuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk para pemeran pendidikan dalam menyusun perangkat di satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan perlu di evaluasi secara berkala dan diperbarui sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik dan isu-isu terkini. Kerangka kurikulum nasional harus dapat memberikan kesempatan untuk inovasi dan kebebasan, sehingga sekolah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, kurikulum nasional sebaiknya tidak cepat berubah, namun memungkinkan

adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang Kemendikbud lakukan dengan merancang kurikulum merdeka.

Perubahan kurikulum nasional tidak begitu cepat, bahkan cenderung lambat. Sejak diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) (2004), kemudian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (2006), Kurikulum 2013 (K-13) (2013), dan Kurikulum Merdeka yang ditetapkan secara nasional pada 2024. Pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum sebelumnya (K13) diterapkan selama 11 tahun dan melewati kurang lebih empat menteri pendidikan. Maka, anggapan ganti menteri ganti kurikulum sebenarnya tidak tepat. Kedua, pergantian kurikulum adalah hal wajar, karena terjadinya perubahan sosial. Justru aneh jika kurikulum tidak berganti sementara masyarakat sudah semakin berubah khususnya terkait perkembangan teknologi. Bahwa tidak semua daerah di negeri tersentuh dengan teknologi adalah sebuah kenyataan, namun tidak kemudian melakukan penolakan terhadap setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan kurikulum.

Data tentang ranking Indonesia dalam hal pembelajaran, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah informasi dari *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah, sedangkan untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia berada diposisi ke-74 dari 79 Negara (Feriyanto, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak Indonesia yang kesulitan memahami bacaan sederhana atau memahami matematika dasar. Studi yang lain memperlihatkan kesenjangan pendidikan di antara wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Upaya mengatasi hal ini adalah melalui perubahan yang sistemik, yaitu perubahan kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum berpengaruh terhadap proses pembelajaran secara umum, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah dialami.

Kebijakan Kurikulum Merdeka didasari oleh dua hal. Pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kedua, dengan adanya kebijakan opsi kurikulum, diharapkan perubahan kurikulum nasional dapat terjadi dengan kelancaran dan secara bertahap. Penyusunan kerangka kurikulum merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemudian pada penerapannya, dapat menyesuaikan dari sekolah dan guru. Guru memiliki

kebebasan dalam mengembangkan perangkatnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kurikulum disetiap sekolah memiliki potensi untuk berbeda dan seharusnya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah, namun tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama.

Penerapan Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara terbatas. Hal ini sesuai kebijakan Kemdikbudristek yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam melakukan penerapan kurikulum. Penerapan Kurikulum Merdeka ini ditawarkan dengan memperhatikan kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Pada Kurikulum Merdeka, guru ditekankan dapat menjadi fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran (Firmansyah, 2023). SMKN 3 Banjarmasin berperan sebagai sekolah dengan peran mandiri berbagi. Ada tiga peran untuk sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahap awal ini, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.

Pada proses evaluasi, sekolah telah menerapkan asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survey karakter yang merupakan langkah awal dari penerapan Kurikulum Merdeka. Dalam perkembangannya AKM diberubah menjadi AN (Asesmen Nasional) (Marsela Yulianti et al., 2022). Asesmen sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) merupakan perubahan sistem evaluasi secara nasional. Perubahan sistem evaluasi ini secara tidak langsung juga mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah (Rohim, 2021). Pelaksanaan AN di SMKN 1 Banjarmasin dilaksanakan oleh siswa dan siswi kelas XI, sehingga mereka tidak terbebani dari anggapan bahwa asesmen mempengaruhi kelulusan. AN dilakukan untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerasi siswa. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar siswa di abad ke-21 (Patriana et al., 2021). Literasi terkait dengan kemampuan peserta didik memahami setiap teks. Sedangkan numerasi adalah kemampuan peserta memahami angka-angka pada teks. Rendahnya literasi dan numerasi pelajar Indonesia merupakan salah satu dasar perubahan kurikulum (Yayuk et al., 2023).

Selain AN, literasi dan numerasi, maka ada juga P5. SMKN 3 Banjarmasin melakukan penilaian berbasis proyek (P5). Adapun tema P5 dalam Kurikulum Merdeka, adalah (1) Gaya Hidup Berkelanjutan, (2) Kearifan lokal, (3) Bhinneka Tunggal Ika, (4) Bangunlah Jiwa dan Raganya, (5) Suara Demokrasi, (6) Rekayasa dan Teknologi, (7) Kewirausahaan, (8) Kebekerjaan. Peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan satu proyek dimana semua guru mapel terlibat di dalamnya, sehingga proyek tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi dari beberapa mata pelajaran. Pekerjaan utama proyek berasal dari kompetensi jurusan, sedangkan mata pelajaran umum dapat menambahkan sesuai dengan materi. Proyek ini dilakukan sebagai

pengganti dari penilaian sumatif di akhir semester sebagai pelengkap penilaian formatif yang telah dilaksanakan oleh guru masing-masing mata pelajaran saat proses belajar mengajar.

Pelaksanaan P5 di SMKN 3 dilaksanakan dengan sistem blok. Sistem blok yang dimaksud adalah per pekan, maksudnya dalam satu pekan, pelajaran berlangsung dengan mata pelajaran biasa, kemudian pekan berikutnya, khusus pelajaran P5. Kegiatan P5 ini didampingi oleh guru-guru mata pelajaran yang alokasi jam pelajarannya terdapat jam P5. Mata pelajaran yang tidak termasuk dalam muatan P5 hanya mata pelajaran Muatan Lokal dan mata pelajaran Produktif di kelas X. Pelaksanaan P5 dilakukan secara klasikal gabungan seluruh kelas X dan dibimbing oleh guru mata pelajaran. Pada kegiatan P5, peserta didik mendapatkan materi di antaranya bahaya Narkoba, perhatian terhadap lingkungan, membuat kerajinan dan memasarkannya, hingga penyaluran bakat seni. Hal ini sudah sesuai dengan acuan dari pemerintah mengenai pelaksanaan P5, meskipun dilakukan secara klasikal gabungan seluruh kelas X per pekan, namun hal ini lebih memudahkan guru dalam mengelola kegiatan tersebut. Guru dapat saling membantu dalam pemberian muatan P5, mengingat hal ini adalah hal yang baru dalam kurikulum. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan P5.

Pada perencanaan dan pembuatan perangkat dalam proses pembelajaran, guru-guru di SMKN 3 Banjarmasin telah merancang modul. Diantara komponen penting modul adalah analisis terhadap capaian pembelajaran (CP) untuk dijadikan tujuan pembelajaran (TP) dan selanjutnya disusun ATP-nya (Alur Tujuan Pembelajaran). ATP dikembangkan dari CP yang dibuat oleh pemerintah pusat (Barlian et al., 2022). Pembuatan modul disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga hal ini memungkinkan ada dua modul pada tingkat kelas yang sama. Hal ini sudah sesuai dengan petunjuk dari perencanaan pembelajaran pada Kurikulum Merdeka yang salah satu konsep besarnya adalah penyederhanaan perangkat pembelajaran (Muhardini et al., 2023).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di SMKN 3 Banjarmasin telah berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa penerapan itu yakni pengukuran keberhasilan peserta didik tidak lagi hanya dilihat dari angka-angka melalui ujian nasional (UN), namun juga menyangkut kecakapan menyelesaikan masalah dan proyek (P5). Guru dalam merancang pembelajaran harus sesuai dengan potensi peserta didik. Sekolah diharapkan melakukan penguatan Kurikulum Merdeka secara berkala kepada guru melalui berbagai kegiatan akademik baik melalui *In House Training* (IHT), pelatihan dan workshop.

Penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan mulai dari perencanaan pembelajaran yang disebut modul ajar yang didalamnya terdapat perumusan ATP yang diperoleh dari TP dan CP. P5 dilaksanakan di sekolah dengan sistem blok tanpa mengurangi jam pelajaran para guru mata pelajaran. Penelitian ini terbatas pada penerapan Kurikulum Merdeka secara umum sehingga tidak mampu menggambarkan secara utuh dan rinci setiap program Kurikulum Merdeka. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji Kurikulum Merdeka secara lebih komprehensif pada setiap variabel, seperti modul ajar, asesmen, literasi dan numerasi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K. (2020). MERDEKA BELAJAR DALAM PANDANGAN KI HADJAR DEWANTARA DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>
- Arrohman, D. A., & Lestari, T. (2023). Analisis keragaman peserta didik dan implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran fisika. *Journal of Science and Education Research*, 2(2), 1–11.
- Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, P. (2022). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(12), 2105–2118. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/joel.v1i12.3015>
- Budiono, A. N., Yahya, S. R., Siyono, S., Pratiwi, D. A., & Ginting, R. (2023). Pelatihan Mendesain Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bagi Komite Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 410–420.
- Faiz, A., & Purwati, P. (2021). Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan General Education. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 649–655.
- Feriyanto, F. (2022). Strategi penguatan literasi numerasi matematika bagi peserta didik pada kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Gammath*.
- Firmansyah, H. (2023). Proses Perubahan Kurikulum K-13 Menjadi Kurikulum Merdeka. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(3), 1230–1240. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4910>
- Madhakomala, Aisyah, L., Rizqiqa, F. N. R., Putri, F. D., & Nulhaq, S. (2022). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Paulo Freire. *At- Ta'lim : Jurnal Pendidikan*, 8(2), 162–172. <https://doi.org/10.55210/attalim.v8i2.819>
- Marsela Yulianti, Divana Leli Angraini, Siti Nurfaizah, & Anjani Putri Belawati Pandiangan. (2022). PERAN GURU DALAM MENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 290–298. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>
- Mayekti, M. H. (2023). Lokakarya Dan Pendampingan Sekolah Untuk Pembelajaran Yang Berpusat Pada Peserta Didik Dalam Kurikulum Merdeka. *Migunani Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 6–9.
- Muhardini, S., Sudarwo, S., Anam, K., Bilal, A. I., Mayasari, D., Haifaturrahmah, H., & Ibrahim, I. (2023). Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran Di Gugus 5 Kota Mataram. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 839–843.
- Munawar, M. (2022). Penguatan Komite Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 65–72. <https://doi.org/10.35878/tintaemas.v1i1.390>
- Palestina, R. L., Pangan, A. D., & Ancho, I. V. (2020). Curriculum Implementation Facilitating and Hinder Factors: The Philippines Context. *International Journal of Education*, 13(2), 91–104. <https://doi.org/10.17509/ije.v13i2.25340>
- Patriana, W. D., Utama, S., & Wulandari, M. D. (2021). Pembudayaan Literasi Numerasi untuk Asesmen Kompetensi Minimum dalam Kegiatan Kurikuler pada Sekolah Dasar Muhammadiyah. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3413–3430.

<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1302>

- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319.
- Rohim, D. C. (2021). Konsep Asesmen Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal VARIDIKA*, 33(1), 54–62. <https://doi.org/10.23917/varidika.v33i1.14993>
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248–8258. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>
- Suryaman, M. (2020). Orientasi pengembangan kurikulum merdeka belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 13–28.
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>
- Yayuk, E., Restian, A., & Ekowati, D. W. (2023). Literasi Numerasi dalam Kerangka Kurikulum Merdeka Berbasis Art Education. *International Journal of Community Service Learning*, 7(2), 228–238. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i2.56278>